

**FUNGSI KOORDINASI VERTIKAL DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA
BERENCANA (KB) DI KECAMATAN BINJAI KOTA**

SKRIPSI

Oleh :

RAFIKA DURI
NPM 1503100053

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Administrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : RAFIKA DURI
NPM : 1503100053
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : FUNGSI KOORDINASI VERTIKAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (KB) DI KECAMATAN BINJAI KOTA

Medan, 14 Maret 2019

PEMBIMBING


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI


NALIL KHAIIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN




Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : RAFIKA DURI
NPM : 1503100053
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Kamis, 14 Maret 2019
Waktu : 07.45 s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : IDA MARTINELLY, SH., MM (.....)
PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP (.....)
PENGUJI III : Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom



Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya RAFIKA DURI, NPM 1503100053, menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh undang-undang termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu, atau memplagiat, menjiplak dan mengambil karya orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, ciplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaannya di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian saya di batalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan pemberian ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 13 Februari 2019

Yang Menyatakan





Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : RAIKA DURI
NPM : 1503100053
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : Fungsi koordinasi vertikal Dalam Pelaksanaan Program
Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Bindai kota.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	31/12-2018	Bimbingan Bab 1,2,3 Proposal	
2.	2/01-2019	Bimbingan Bab 1,2,3 Proposal	
3.	3/01-2019	Bimbingan Bab 1,2,3 Proposal dan Acc	
4.	23/01-2019	Bimbingan daftar wawancara	
5.	24/01-2019	Bimbingan daftar wawancara & acc	
6.	22/02-2019	Bimbingan Bab 4,5 Skripsi	
7.	25/02-2019	Bimbingan Bab 4,5 Skripsi	
8.	28/02-2019	Bimbingan Bab 4,5 Skripsi	
9.	1/03-2019	Bimbingan Bab 4,5	
10.	1/3 2019	Acc Mpa Hlgan	

Medan, 01 MARET.....2019...

Dekan,

(Ariem Saleh S. S. S. M. Pd)

Ketua Program Studi,

(Nabil Khairiah S. P. Pd)

Pembimbing ke : 1...

(Ariem Saleh S. S. S. M. Pd)

ABSTRAK

FUNGSI KOORDINASI VERTIKAL DALAM PELAKSANAAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (KB) DI KECAMATAN BINJAI KOTA

Oleh :

RAFIKA DURI

1503100053

Program Kampung Keluarga Berencana (KB) adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun, atau yang setara, yang memiliki kriteria tertentu, di mana terdapat keterpaduan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara nasional merupakan alternatif baru yang bersifat kedaerahan dan bernuansa kearifan lokal yang disebut istilah “Kampung KB” atau lengkapnya “Kampung Keluarga Berencana”. Dipilihnya program kampung keluarga berencana (KB) sebagai objek penelitian karena program ini adalah salah satu program yang sedang berjalan Di Kota Binjai Kecamatan Binjai Kota. Program kampung keluarga berencana (KB) ini bertujuan untuk membangun infrastruktur wilayah desa dan kelurahan dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi Koordinasi Vertikal dalam pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Binjai Kota. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif, serta menghubungkan secara sistematis melalui teknis analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan dengan pihak kelurahan berjalan dengan baik akan tetapi dalam koordinasi tersebut belum tercapainya keefektifan dan keefesienan pelaksanaannya. Oleh karena itu pihak kecamatan agar lebih memperhatikan prosedur pengkoordinasian agar program tersebut berjalan dengan baik, begitu pula dengan pelaksanaan program kampung KB belum berjalan dengan maksimal karena kurangnya partisipasi dari masyarakat. Maka dari itu pelaksana harus lebih memperhatikan masyarakat agar program kampung KB berjalan dengan baik dan sesuai tujuan.

Kata kunci : Fungsi Koordinasi vertikal, Kampung KB

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Maha suci Allah SWT yang menganugrahkan setiap orang yang menjalani hidup di dunia ini yang berbeda. Maha indah karunia-Nya telah memberikan masing-masing orang dengan potensi yang beraneka rupa. Puji dan syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas karunia, hidayah dan anugrah-Nya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Pembangunan Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan selesainya skripsi ini dengan judul **KOORDINASI VERTIKAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (KB) DI KECAMATAN BINJAI KOTA**. Salawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan akhirat kelak.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: teristimewa dan yang utama serta paling tercinta dan tersayang kepada orang tua saya yaitu Ayahanda **SABRI S.Pd** dan Ibunda **MAIMUNAH** yang telah mendukung dan membantu saya baik dari segi moril maupun materil. Yang selalu mendukung, memotivasi serta doa restu kepada saya untuk terus maju mencapai cita-cita saya. Mereka adalah sumber inspirasi dan motivasi saya dalam melangkah kedepan

untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Karena dengan doa restu dan tetesan keringatmu wahai orangtua ku, aku bisa mencapai cita-cuku hari ini telah kudapati apa yang aku impikan yang telah ku tempuh dengan cucuran keringat , keyakinan dan kesabaran, engkau telah mengantarkanku ke hari depan. Sebuah karya kecil ini dari dari perjalananku, aku persembahkan juga kepada kakak saya, Mahdalenawati S.Kep, Ners dan adik saya Windri Riski yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat kepada saya. Dalam penyelesaian pendidikan saya sampai akhir penulisan skripsi ini kumohon ya Allah semoga mereka selalu dalam lindungan-Mu amin...

Serta penulis juga mengucapkan terimakasih setulusnya kepada:

1. Bapak Drs.Agussani, M.AP selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan arahan serta waktunya.
3. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip.,M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Dosen seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.

5. Seluruh pegawai staff biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis.
6. Bapak Toni Ismail S.Si selaku kasub bag umum dan Kepegawaian Kantor Camat Binjai Kota yang telah memberikan waktunya kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasinya.
7. Para narasumber lainnya yang di sertakan dalam penelitian ini yaitu pegawai kantor Camat Binjai Kota dan pegawai kantor kelurahan setia.
8. Kepada seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada yang terkhusus teman dekat saya Muhammad Ari Saputra yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada kakak sekaligus teman saya Eka Fadhila S.Kep, Ners yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada sahabat-sahabat dan teman seperjuangan saya di IAP A dan B SORE konsentrasi pembangunan Arini Larashati, Fuadi, Nona Sintia, Berlian Ratna Bulan.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga mendapat balasan dari

allah swt serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang selama penulis duduk diperkuliahan sampai akhirnya penyelesaian skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi untuk kedepannya amin.

Medan, 13 Februari 2019

RAFIKA DURI

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat penelitian.....	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II URAIAN TEORISTIS.....	6
2.1 Pengertian fungsi.....	6
2.2 Pengertian Koordinasi.....	6
2.3 Pengerian Koordinasi Vertikal.....	11
2.4 Pengertian Pelaksanaan.....	11
2.5 Pengertian Program.....	16
2.6 Program Pemerintah.....	16
2.7 Program Kampung KB.....	17
2.8 Sarana dan Prasarana.....	32
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Kerangka Konsep.....	33
3.3 Defenisi Konsep.....	34
3.4 Kategorisasi	36
3.5 Narasumber.....	37
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.7 Tenik Analisis Data.....	38
3.8 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	39
3.9.1 Lokasi dan waktu Penelitian.....	39
3.9.2 Letak dan lokasi penelitian.....	39

3.9.3 Sejarah Singkat Kecamatan Binjai Kota.....	40
3.9.4 Visi, Misi Kecamatan Binjai Kota.....	41
3.9.5 Tugas Pokok Fungsi.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
4.1 Hasil Penelitian	58
4.2 Pembahasan.....	75
BAB V Penutup	84
5.1 Simpulan	84
5.2 Saran.....	86

Daftar pustaka
Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian	37
Tabel 3.2 Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselonisasi.....	57
Tabel 3.3 Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kegenderan.....	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Konsep.....	34
Gambar 3.2 Struktur Organisasi.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Wawancara
Lampiran III	: Sk-1 Permohonan Judul Skripsi
Lampiran IV	: Sk-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran V	: Sk-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VI	: Sk-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VII	: Sk-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VIII	: Surat Permohonan Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran IX	: Surat Keterangan Riset Penelitian Mahasiswa
Lampiran X	: Undangan Panggilan Skripsi

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Program Kampung Keluarga Berencana (KB) adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun, atau yang setara, yang memiliki kriteria tertentu, di mana terdapat keterpaduan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara nasional merupakan alternatif baru yang bersifat kedaerahan dan bernuansa kearifan lokal yang disebut istilah “Kampung KB” atau lengkapnya “Kampung Keluarga Berencana”.

Dengan adanya program Kampung KB diharapkan akan membuat Program KB bergema kembali dan dapat menjangkau masyarakat, terutama yang berada di desa-desa, dusun-dusun, dan kampung-kampung di seluruh Indonesia. Berdasarkan UU No. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencanan menekankan kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak hanya terbatas pada masalah pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera saja namun juga menyangkut masalah pengendalian penduduk. Berdasarkan UU No. 52 Tahun 2009 dijelaskan tentang perkembangan pendudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh

dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan, serta pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan karakteristik kampung keluarga berencana dari aspek fisik sebagai berikut: kumuh, wilayah pesisir atau nelayan, daerah aliran sungai (DAS), bantaran kereta api, kawasan miskin (termasuk miskin perkotaan), terpencil, wilayah perbatasan, kawasan industri, kawasan wisata, tingkat kepadatan penduduk tinggi. Selain karakteristik fisik, karakteristik non fisik pun perlu diidentifikasi guna melengkapi penyebab kumuh dari aspek non fisik seperti perilaku masyarakat dan kepastian usaha.

Tujuan dibentuknya Kampung KB ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Sedangkan secara khusus, Kampung KB ini dibentuk selain untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.

Program kampung KB Kecamatan Binjai Kota Provinsi Sumatra Utara dilaksanakan di Kelurahan Setia. Kelurahan Setia ditetapkan sebagai Kampung KB atas dasar surat keputusan dari wali Kota Binjai. Kelurahan Setia memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.510 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak

1.052 kk. Kondisi Kelurahan Setia dari aspek fisik sebagai berikut: wilayah dianggap kumuh dari semua wilayah yang terletak di daerah perkotaan Kota Binjai, terletak di pinggiran sungai, rawan banjir, rawan ekonomi, rawan pendidikan, rawan kesehatan, dan rawan pangan. Berdasarkan kondisi wilayah Kelurahan Setia yang tepat dengan kriteria program Kampung KB yang telah ditetapkan sebelumnya, oleh karena itu Kelurahan Setia ditetapkan sebagai salah satu kelurahan pelaksana program Kampung KB di Kecamatan Binjai Kota.

Dalam pelaksanaan program Kampung KB pihak Kecamatan Binjai Kota memiliki fungsi koordinasi vertikal dengan pihak kelurahan, hal ini sejalan dengan fungsi kecamatan antara lain:(1) sebagai wadah untuk koordinasi dan pemberdayaan masyarakat, (2) institusi yang menjaga penegakan peraturan perundangan, (3) melaksanakan kegiatan pelayanan pemerintah, (4) membina pemerintah tingkat desa atau kelurahan, (5) mengevaluasi pelayanan pemerintah di desa atau kelurahan.

Pelaksanaan program kampung KB di Kelurahan Setia Kecamatan Binjai Kota kurang berjalan dengan baik sesuai tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh faktor kurangnya kecakapan, mis komunikasi antar pelaksana kampung KB sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu perlu adanya pengkoordinasian dan pembinaan oleh pihak aparatur camat dalam pembinaan dan membangun sumber daya manusia serta pemenuhan sarana dan fasilitas kerja dalam pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang fungsi koordinasi vertikal kecamatan dengan kelurahan dalam

pelaksanaan program Kampung KB ini di Kecamatan Binjai Kota. Untuk itu penulis melakukan penelitian yang menuangkan dalam judul skripsi: **”Fungsi Koordinasi Vertikal Dalam Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Binjai Kota”**.

1.2 Perumusan masalah

Perumusan masalah adalah hal yang sangat penting untuk dibahas karena masalah disini merupakan tantangan yang akan dicari jalan keluar ataupun diatasi dengan berbagai alternative sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana fungsi koordinasi vertikal dalam pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Binjai Kota?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yakni: Untuk mengetahui fungsi koordinasi vertikal dalam pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Binjai Kota.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan bagi penulisan mengenai ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

- b. Sebagai bahan masukan, pedoman sekaligus bahan pertimbangan yang mungkin berguna dan bermanfaat dalam melaksanakan program kampung keluarga berencana (KB).
- c. Sebagai bahan referensi bagi pengembang atau peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Menguraikan pengertian dan konsepsi tentang fungsi, definisi koordinasi, koordinasi vertikal, definisi pelaksanaan, definisi program, definisi program pemerintah, definisi kampung keluarga berencana.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang Jenis Penelitian, Definisi Konsep, Kerangka Konsep, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian

BAB V : PENUTUP

Menyajikan tentang simpulan dan saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Fungsi

Bilamana dari jumlah pekerjaan suatu organisasi telah menjadi sangat banyak, maka untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaannya perlu dikelompokkan menjadi kesatuan bidang kerja, masing-masing bidang kerja ini bisa disebut fungsi (Gie, 1992).

Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia fungsi merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi adalah kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga.

2.2 Pengertian Koordinasi

Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri (Hasibuan, 2007).

Koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur (KBBI).

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-

bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Handoko, 2003).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah perwujudan dari kerjasama, saling membantu dan menghargai, menghayati tugas dan fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

a. Syarat-syarat koordinasi

1. Perasaan untuk saling bekerja sama, dilihat perbagian.
2. Dalam organisasi besar sering diadakan persaingan antar bagian, agar saling berlomba.
3. Perbagian harus saling menghargai
4. Bagian yang saling menghargai akan makin semangat.

b. Prinsip-prinsip koordinasi

1. Koordinasi harus dimulai dari tahap perencanaan awal
2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi kepentingan bersama
3. Koordinasi merupakan proses terus menerus dan berkesinambungan
4. Koordinasi merupakan pertemuan-pertemuan bersama untuk mencapai tujuan
5. Perbedaan pendapat harus diakui sebagai pengayaan dan harus dikemukakan secara terbuka dan diselidiki dalam kaitannya dengan situasi secara keseluruhan.

c. Sifat-sifat koordinasi

1. Koordinasi bersifat dinamis bukan statis

2. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator dalam rangka mencapai sasaran.
 3. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.
- d. Faktor yang mempengaruhi koordinasi
1. Kesatuan tindakan

Kesatuan dari pada usaha, berarti pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini merupakan suatu kewajiban dari pemimpin untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.
 2. Komunikasi

Komunikasi adalah hal yang sangat penting, oleh karena itu komunikasi tidak bisa dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi.
 3. Pembagian kerja

Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau lebih orang yang bekerja sama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perorangan

4. Disiplin

Pada setiap organisasi yang kompleks setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda agar kegiatan daripada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan, untuk itu diperlukan disiplin.

e. Cara melakukan koordinasi

Koordinasi dapat dilakukan secara formal dan informal, melalui konferensi lengkap, pertemuan berkala, pembentukan panitia gabungan, pembentukan badan koordinasi staff, wawancara dengan bawahan, edaran/memo berantai, buku pedoman lembaga, tata kerja dan sebagainya.

Adapun cara-cara melakukan koordinasi, yakni:

1. Mengadakan pertemuan informal diantara pejabat
2. mengadakan pertemuan formal antar para pejabat (rapat)
3. Membuat edaran berantai kepada para pejabat yang diperlukan
4. Membuat penyebaran kartu kepada pejabat yang diperlukan
5. Mengangkat koordinator
6. Membuat buku pedoman lembaga, buku pedoman tata kerja, dan buku pedoman kumpulan peraturan
7. Berhubungan melalui alat penghubung (telepon)

f. Hambatan dalam pelaksanaan koordinasi

1. Para pejabat sering kurang menyadari bahwa tugas yang dilaksakannya hanyalah merupakan sebagian saja dari keseluruhan tugas dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.
 2. Para pejabat sering memandang tugasnya sendiri sebagai tugas yang paling penting dibandingkan dengan tugas-tugas yang lainnya.
 3. Adanya pembagian kerja atau spesialisasi yang berlebihan dalam organisasi.
 4. Kurang jelasnya rumusan tugas atau fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pejabat atau satuan organisasi
 5. Adanya prosedur dan tata kerja yang kurang jelas dan berbelit-belit dan tidak diketahui oleh semua pihak yang bersangkutan dalam usaha kerjasama.
 6. Kurangnya kemampuan dari pimpinan untuk menjalankan koordinasi yang disebabkan oleh kurangnya kecakapan, wewenang dan kewibawaan.
 7. Kurangnya forum komunikasi diantara para pejabat yang bersangkutan yang dapat dilakukan dengan saling tukar menukar informasi dan diciptakan adanya saling pengertian guna kelancaran pelaksanaan kerjasama.
- g. Tujuan koordinasi
1. Untuk meraih dan memelihara keefektivitasan organisasi seoptimal mungkin dengan sinkronasi, kebersamaan, keselarasan serta keseimbangan antara aktivitas yang saling berhubungan.

2. Untuk mencegah konflik dan membuat efisiensi yang optimal pada berbagai kegiatan interdependen melalui kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.
3. Untuk menciptakan dan menjaga supaya suasana dan perilaku yang saling merespon dan mengantisipasi pada setiap unit kerja baik yang berhubungan atau tidak. Hal ini agar kesuksesan masing-masing unit tidak mengganggu atau diganggu oleh unit lainnya. Untuk itu dibutuhkan koordinasi dengan jaringan komunikasi dan informasi yang efektif.

2.3 Pengertian Koordinasi Vertikal

Koordinasi vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga-lembaga lain yang derajatnya lebih rendah (Inu, 2011). Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur.

2.4 Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut para ahli:

Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek (Bintoro, 2000).

Pelaksanaan/penggerakan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan

ikhlas untuk bekerja dengan sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan (*actuating*) dilakukan setelah sebuah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian terhadap sumber daya yang ada (Siagian, 2007).

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan itu adalah suatu kegiatan dalam proses merealisasikan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan dapat tercapai dengan memperhatikan kesesuaian, kepentingan dan kemampuan implementor dan suatu kelompok sasaran. Dengan demikian, pelaksanaan sebagai suatu kegiatan untuk merealisasikan tujuan terhadap sebuah sasaran sehingga suatu pelaksanaan akan mengarah kepada usaha yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Unsur penting dalam proses implementasi: (1) adanya program atau kebijakan yang sedang dilaksanakan, (2) kelompok sasaran yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan untuk manfaat dari program, perubahan atau perbaikan, (3) menerapkan elemen (pelaksana) baik untuk organisasi atau individu yang bertanggung jawab untuk memperoleh pelaksanaan dan pengawasan proses implementasi.

Suatu rencana terealisasi setelah tersusun dan jika program kerja yang “achievement oriented” telah dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya. Lebih lanjut, dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir sumber-sumber

staf dan selanjutnya menyusun peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tertentu.

- b. Pemberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencana praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas dan sumber-sumber.
- c. Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai.
- d. Review artinya pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, analisis pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan dan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diharapkan adanya saran dan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan penyimpangan.

Faktor pelaksanaan menempati posisi paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu program untuk diwujudkan. Menurut Bintoro (2000) dalam proses kegiatannya perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain:

- a. Perlu ditentukan secara jelas siapa atau badan/lembaga mana secara fungsional akan disertai wewenang mengkoordinasi program didalam suatu sektor.
- b. Perlu diperhatikan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik. Dalam program pelaksanaan itu, dasar prinsip fungsional perlu dituangkan kedalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut.

- c. Perlu dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain dalam bentuk badan kerjasama atau suatu panitia kerjasama dengan tanggung jawab dan koordinasi yang jelas.
- d. Perlu diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaan.

Untuk mengungkap keberhasilan pelaksanaan suatu program, dibutuhkan indikator-indikator atau faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program agar dapat diketahui seberapa berhasilkah program yang telah dijalankan dalam setiap aspek yang ada. Di dalam faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu program terdapat indikator-indikator didalamnya yang termuat seperti: komunikasi, sumberdaya anggaran, struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari seseorang pembuat program kepada pelaksana program (implementor). Komunikasi yang berjalan efektif akan menciptakan kesamaan pandangan dan pemikiran antara pembuat dan dapat memahami apa yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran serta substansi dari program tersebut.

b. Sumberdaya Anggaran

Selain sumberdaya manusia, salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan program adalah sumberdaya dana yang diperlukan untuk biaya operasional pelaksanaan program. Terbatasnya anggaran yang tersedia dapat menimbulkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Kondisi seperti ini menyebabkan kurang optimalnya tugas dan fungsi para pelaku

program, karena mereka tidak mendapatkan intensif sesuai dengan yang diharapkan yang akhirnya dapat menyebabkan kegagalan program

c. Sumberdaya informasi dan kewenangan

Sumberdaya informasi merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan program. Dimana informasi yang relevan dan cukup tentang arah, maksud dan tujuan suatu program dapat mengurangi kesalahan para pelaksana dalam menginterpretasikan cara terbaik dalam melaksanakan program tersebut. Informasi juga penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi agar mereka mau menjalankan dan mematuhi tugas dan tanggungjawabnya. Kewenangan juga merupakan sumberdaya lain yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program. Kewenangan diperlukan untuk menjamin dan meyakinkan bahwa program yang akan dilakukan sesuai dengan yang dikehendaki oleh semua pihak yang terkait.

d. Peranan lembaga atau instansi

sebagai birokrasi pelaksana dalam proses pelaksanaan program memang tidak dapat dilepaskan, karena ketika suatu program telah diputuskan, maka dibutuhkan suatu sistem untuk melaksanakan program tersebut.

Keberhasilan pelaksanaan program yang kompleks membutuhkan adanya kerjasama yang baik dari banyak orang. Oleh karena itu, fragmentasi organisasi dapat merintangangi koordinasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program yang kompleks.

2.5 Pengertian Program

Definisi program yang termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, menyatakan bahwa: Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.

Suatu program ditulis untuk memudahkan dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu output yang diinginkan oleh pembuat program. Program dapat dipakai berulang-ulang tanpa harus menulis kembali program tersebut (sugiyono, 2005). Pengertian program adalah rancangan mengenai asas serta usaha (Binanto, 2009).

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan.

2.6 Program Pemerintah

Program pemerintah adalah seperangkat tindakan pemerintah yang di desain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Dan sebagai suatu instrumen dibuat oleh pemerintah, kebijakan publik dapat berbentuk aturan-aturan umum atau khusus baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang berisi pilhan-pilihan tindakan yang merupakan keharusan, larangan atau kebolehan yang dilakukan untuk mengatur seluruh warga masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dengan tujuan tertentu (Binanto, 2009).

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa program pemerintah adalah upaya-upaya dalam mewujudkan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

2.7 Kampung Keluarga Berencana (KB)

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekankan kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak hanya terbatas pada masalah Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera saja namun juga menyangkut masalah pengendalian penduduk. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin mempertegas kewenangan tersebut, dimana pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota pada huruf N (Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) menegaskan kewenangan dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Empat sub urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang harus dilaksanakan oleh masing masing tingkatan perintah yaitu; (1) sub urusan Pengendalian Penduduk, (2) sub urusan Keluarga Berencana, (3) sub urusan Keluarga Sejahtera, dan (4) sub urusan Sertifikasi dan Standarisasi.

Lebih lanjut terkait dengan arah kebijakan pembangunan nasional Pemerintah periode 2015-2019, BKKBN diberi mandat untuk dapat turut mensukseskan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita), terutama pada Agenda Prioritas nomor 5 (lima) “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta melaksanakan Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 (Dimensi Pembangunan) untuk Dimensi Pembangunan Manusia pada Pembangunan Bidang Kesehatan Landasan hukum, perkembangan lingkungan strategis dan arah kebijakan pembangunan Pemerintahan periode 2015-2019 diatas kemudian dijabarkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) BKKBN tahun 2015-2019, dengan 6 (enam) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan; (1) menurunkan rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk tingkat nasional (persen per tahun) dari 1,38 persen/tahun tahun 2015 menjadi 1,21 persen tahun 2019; (2) Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) per perempuan usia reproduksi dari 2,37 tahun 2015 menjadi 2,28 tahun 2019; (3) meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) semua metoda dari 65,2 persen menjadi 66 persen; (4) menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani/unmet need dari jumlah pasangan usia subur (persen) dari 10,6 persen tahun 2015 menjadi 9,91 persen tahun 2019; (5) menurunnya Age Specific Fertility Rate (ASFR) dari 46 (pada tahun 2015) menjadi 38 per 1.000 perempuan kelompok umur 15-19 tahun pada tahun 2019; (6) menurunnya persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari Wanita Usia Subur dari 7,1 persen tahun 2015 menjadi 6,6 persen tahun 2019.

Dalam upaya pencapaian 6 (enam) Sasaran Strategis diatas, BKKBN harus dapat melakukan berbagai langkah penguatan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang benar-benar memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran, serta penguatan kegiatan-kegiatan prioritas secara komprehensif dan berkelanjutan di seluruh tingkatan wilayah. Selain itu, BKKBN juga harus memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan berbagai permasalahan program yang harus dihadapi saat ini.

Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus antara lain stagnasi pencapaian program dan semakin melemahnya implementasi Program KKBPK di lini lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan dan atas petunjuk Bapak Presiden RI, maka kemudian dirumuskan beberapa inovasi strategis penguatan Program KKBPK untuk periode 2015-2019 terutama untuk melaksanakan kegiatan prioritas yang memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan serta memperluas cakupan penggarapan Program KKBPK di seluruh tingkatan wilayah.

Lebih lanjut dalam langkah penguatan Program KKBPK 2015-2019, Bapak Presiden Republik Indonesia mengamanatkan BKKBN agar dapat menyusun suatu kegiatan/program yang dapat memperkuat upaya pencapaian target/sasaran Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2015-2019, dapat menjadi ikon BKKBN serta dapat secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia di seluruh tingkatan wilayah. Dalam hal ini kemudian disepakati agar BKKBN segera dapat membentuk Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB).

Kampung KB menjadi salah satu inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program KKBPK secara utuh di lini lapangan. Kampung KB merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total Program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh Bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, mitra kerja, stakeholders instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan pemerintahan terendah (sesuai prasyarat penentuan lokasi kampung KB) di seluruh kabupaten dan kota.

Kampung KB adalah salah satu upaya penguatan Program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB, sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas” Definisi Kampung KB pada “Kamus Istilah Kependudukan dan KB.2011” Kampung keluarga berencana (KB) adalah satuan kesatuan wilayah setingkat Desa/Kelurahan/Dusun/RW, dengan kriteria tertentu, di mana terdapat keterpaduan Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

Kehadiran Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program Keluarga Berencana dan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Prinsipnya Program KKBPK mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera

dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Penerapan fungsi keluarga ini membantu keluarga lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat ditelusur melalui berbagai indikator yang merupakan pencerminan dari pelaksanaan delapan fungsi keluarga. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Dalam PP disebutkan delapan fungsi keluarga. Yang meliputi:

- a. Fungsi keagamaan
- b. Fungsi sosial budaya
- c. Fungsi cinta kasih
- d. Fungsi perlindungan
- e. Fungsi reproduksi
- f. Fungsi sosialisasi dan pendidikan
- g. Fungsi ekonomi dan,
- h. Fungsi pembinaan lingkungan.

Kampung KB juga merupakan wujud dari pelaksanaan agenda prioritas pembangunan Nawacita ke 3, 5, dan 8. Nawacita ketiga yaitu yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Nawacita kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta Nawacita kedelapan yaitu melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan

mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

Meski demikian, tidak semua kampung bisa masuk program Kampung KB. Ada kriteria yaitu utama wilayah dan khusus. Dalam hal kriteria utama, sebuah kampung harus memiliki syarat-syarat seperti jumlah keluarga miskin di atas rata-rata tingkat desa dimana Kampung/RW tersebut berada. Bagi yang membentuk setara Desa, jumlah keluarga miskin di Desa tersebut harus di atas rata-rata Kecamatan dimana Desa itu berada. Selain itu, syarat utama lainnya adalah pencapaian KB di desa tersebut sangat rendah.

a. Kriteria Kampung KB

Dalam hal kriteria wilayah, setiap kampung KB harus memenuhi unsur seperti:

1. kumuh
2. wilayah pesisir atau nelayan
3. Daerah Aliran Sungai (DAS)
4. Bantaran Kereta Api
5. Kawasan Miskin (termasuk miskin perkotan)
6. Terpencil
7. Wilayah Perbatasan
8. Kawasan Industri
9. Kawasan Wisata

10. Tingkat Kepadatan Penduduk Tinggi.

b. Sasaran pelaksanaan:

1. Sasaran langsung

- Keluarga
- Remaja
- PUS
- Keluarga dengan balita
- Keluarga dengan remaja
- Keluarga dengan lansia

2. Sasaran tidak langsung

- Kepala desa/Kelurahan
- Toma (todat, toga)
- LSM dan LSOM
- Unit terkait

3. Sasaran wilayah

- Desa/Kelurahan
- RW
- RT

Sedangkan dalam hal kriteria khusus, dibutuhkan intervensi lintas sektor.

Kampung KB wajib memiliki unsur antara lain pendidikan rendah dan infrastruktur kurang memadai. Untuk memenuhi kriteria tersebut, intervensi dari sektor lain sangat diperlukan.

c. Tujuan kampung KB

1. Tujuan Umum

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas (Dwi Tistyawandani, 2017).

2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan masyarakat untuk menyelenggarakan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan
- c. Meningkatkan jumlah peserta KB aktif modern
- d. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja
- e. Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui Kelompok UPPKS
- f. Menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- g. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- h. Meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah
- i. Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung

- j. Meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih
- k. Meningkatkan kualitas keimanan para remaja/mahasiswa dalam kegiatan keagamaan (pesantren, kelompok ibadah/kelompok doa/ceramah keagamaan) di kelompok PIK KRR/remaja
- l. Meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air para remaja/mahasiswa dalam kegiatan sosial budaya (festival seni dan budaya, dan lain-lain) di kelompok PIK KRR/mahasiswa dan seterusnya.

d. Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB

Kampung KB dibentuk pada tingkatan wilayah Desa/Kelurahan atau Dusun/Rukun Warga (RW) yang memenuhi kriteria-kriteria pemilihan wilayah (sesuai pada point A di atas) dan dalam pelaksanaan program dan kegiatannya dikelola oleh Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB yang terdiri atas:

- 1. Pelindung : Bupati/Walikota
 - 2. Penasehat : kadis PPKB/Kadis terkait
 - 3. Pembina : camat
 - 4. Ketua : kepala desa
 - 5. Sekretaris : PLKB/PKB
 - 6. Bendahara : ketua PKK Tk, Desa/Kelurahan
 - 7. Pelaksana : PKB/PLKB/kader
 - 8. Seksi :
- seksi keagamaan

- seksi sosial/pendidikan
 - seksi reproduksi
 - seksi ekonomi
 - seksi perlindungan
 - seksi kasih sayang
 - seksi sosial budaya dan,
 - seksi pembinaan lingkungan
- e. Kelompok Kegiatan (Poktan) dalam Kampung KB terdiri dari:
1. Forum Musyawarah terdiri dari BPD, LPMD, Toma, Toga, Todat, dll.
 2. Petugas Lini Lapangan terdiri dari PLKB, BIDAN, TP PKK, PPL, dan Petugas Lapangan Instansi terkait;
 3. Poktan Kader-Kader per Bidang sesuai kebutuhan program dan kegiatan pada wilayah Kampung KB (misal: Poktan Kader KKBP, Poktan Kader Bidang Kesehatan, dst)
- f. Operasional kampung keluarga berencana (KB)
1. Pendataan dan pemerataan keluarga
- Pendataan dan Pemetaan Keluarga dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu:
- Pendataan Keluarga (PK) yang dilaksanakan secara Nasional, kemudian dianalisa untuk kepentingan kegiatan di masing-masing seksi diantaranya :
- a. Sasaran Pelayanan Kependudukan
 - b. Sasaran Pelayanan Program KB

- c. Sasaran Pelayanan Program Ketahanan Keluarga
- d. Sasaran Pelayanan pemberdayaan Ekonomi Keluarga
- e. Sasaran Perbaikan Rumah Layak Huni
- f. Sasaran Peningkatan Kesehatan Lingkungan
- g. Sasaran Pencegahan Narkoba
- h. Dan lain-lain

2. Pertemuan tingkat RT

Pertemuan di tingkat RT minimal dilaksanakan setiap tiga bulan sekali atau sesuai kebutuhan masyarakat. Dipimpin oleh ketua RT . dilaksanakan setelah analisa pendataan. Hal-hal yang dibicarakan yaitu:

- a. membahas hasil pendataan kemudian dituangkan dalam peta keluarga tingkat RT
- b. membahas masalah-masalah dan potensi yang ada ditingkat RT,
- c. menyusun program kerja yang akan dibawa/diusulkan di dalam rapat RW/kampung
- d. melaksanakan lelang lelang kepedulian untuk membangun rumah prasejahtera/tidak layak huni

3. Pertemuan sarasehan tingkat kampung

Sarasehan di tingkat Kampung/RW merupakan puncak pembentukan komitmen di Kampung KB. Sarasehan sebaiknya dilaksanakan setahun dua kali.

Pada awal tahun sebagai ajang perencanaan dan evaluasi serta petengahan tahun sebagai alat pemantauan program di tahun yang sedang berjalan. Diluar itu bisa saja pertemuan dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kepentingan.

a. Peserta pertemuan

1. Pengurus Kampung KB/Pokja
2. Para Ketua RT
3. Pengurus Organisasi di tingkat RT (DKM, Organisasi Pemuda dsb)
4. Para Ketua Paguyuban tingkat RT
5. Tokoh-tokoh masyarakat
6. Seluruh warga satu kampung (secara selektif sesuai dengan kebutuhan).

b. Materi Pembahasan

1. Evaluasi pelaksanaan Program tahun yang lalu;
2. Perencanaan program tahunan yang diusulkan masing-masing RT;
3. Pembahasan program masing-masing seksi.

c. Operasionalisasi kampung keluarga berencana (KB)

Kegiatan rutin Kampung KB dilaksanakan secara terus menerus oleh pengurus Pokja Kampung KB termasuk seksi-seksi dan keluarga terhadap program KKBPK dan lintas sektor terkait melalui penerapan 8 fungsi keluarga.

Diharapkan dengan adanya Kampung KB, keluarga semakin meningkat kesejahteraannya dan tidak terdapat lagi keluarga miskin di Kampung KB. Miskin tidak hanya kekurangan ekonomi tapi terhindar dari segala bentuk kemiskinan diantaranya : Miskin Harta, Miskin Ibadah, Miskin Sosial, Terhindar dari kebodohan dan keterbelakangan

d. Pencatatan dan pelaporan.

Pencatatan dan pelaporan di Kampung KB pada prinsipnya mengikuti dua pola:

1. Pencatatan dan pelaporan yang telah baku sesuai dengan aturan program dari tingkat yang lebih atas dari masing-masing instansi pemerintahan/Lembaga, misalnya laporan program KKBPk, Laporan posyandu, laporan organisasi lainnya.
2. Pencatatan dan pelaporan khusus di Kampung KB dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Dari seksi-seksi pengurus kampung KB ke ketua Kampung KB dilaksanakan setiap bulan
 - b. Dari Kampung KB ke tingkat Desa/Kelurahan (Kepala Desa/Lurah) dilaksanakan setiap bulan
 - c. Dari Desa/Kelurahan (Kepala Desa/Lurah) ke tingkat Kecamatan (Camat) dilaksanakan setiap bulan, dengan tembusan kepada Kepala UPTD masing-masing Instansi terkait

- d. Dari Kecamatan (Camat) ke Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan SKPD Kab/Kota terkait
 - e. Dari Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) ke Provinsi (Gubernur) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan SKPD Provinsi terkait
 - f. Dari Provinsi (Gubernur) ke BKKBN dilaksanakan 3 bulan sekali dengan tembusan kepada masing-masing Instansi/ Kementerian / Lembaga.
 - g. Dari BKKBN kepada presiden melalui Kementerian Koordinator PMK dilaksanakan 3 bulan sekali dengan tembusan kepada masing-masing Instansi/ Kementerian/Lembaga.
- g. Pelaksana:
1. Kepala Desa/Lurah
 2. Ketua RW
 3. Ketua RT
 4. PKB/PLKB/TPD
 5. Petugas Lapangan sektor terkait
 6. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Desa/Kelurahan
 7. Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD dan Sub PPKBD)
 8. Tokoh Masyarakat (Tokoh Adat/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat di desa/kelurahan)
 9. Kader

h. Ruang lingkup kegiatan Kampung KB

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan di Kampung KB meliputi:

1. Kependudukan
2. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
3. Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga)
4. Kegiatan Lintas Sektor (Bidang Pemukiman, Sosial Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan sebagainya–disesuaikan dengan kebutuhan wilayah Kampung KB)

i. Sumber-Sumber Pembiayaan Kampung Kb

1. Iuran warga Kampung KB.
2. APBDesa/Kelurahan.
3. APBD II.
4. APBN.
5. Alokasi Dana Desa
6. Dana Desa

2.8 Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha/pembangunan (KBBI, 2002). Sedangkan prasarana segala sesuatu (bisa berupa syarat atau upaya) yang dapat dipakai sebagai alat media dalam mencapai tujuan (KBBI, 2002).

Sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai berikut:

1. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu.
2. Meningkatkan produktivitas, baik barang dan jasa.
3. Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin.
4. Lebih memudahkan atau sederhana dalam gerak para pengguna.
5. Ketetapan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin.
6. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan.
7. Menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang mempergunakannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam menentukan penelitian, terlebih dahulu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian tersebut, sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisa kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam daripada luas atau banyaknya informasi.

Data deskriptif adalah sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri. Sedangkan metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

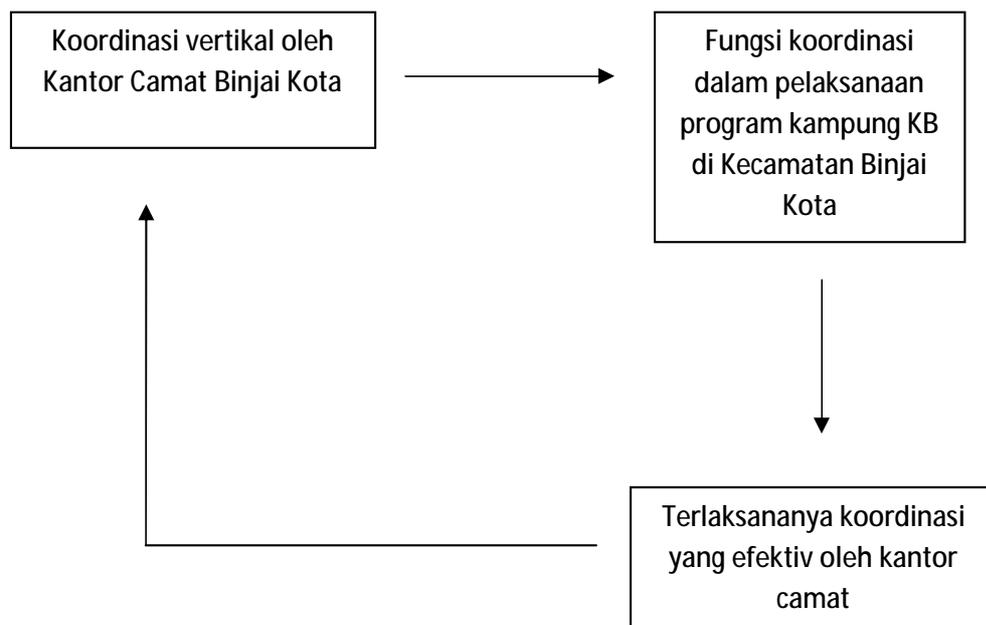
3.2 Kerangka konsep

Berdasarkan judul penelitian, fungsi koordinasi dalam Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Binjai Kota. Kerangka konsep yang akan dideskripsikan dan dijelaskan adalah bagaimana fungsi koordinasi

dalam pelaksanaan program Kampung KB oleh Kecamatan Binjai Kota di Kelurahan Setia.

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka kerangka konsep yang digambarkan dan disusun dalam sebuah model teoritis seperti apa yang digambarkan dalam bagan pada halaman berikut ini.

Gambar 3.1
Kerangka Konsep Penelitian



3.3 Definisi konsep

Konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga objek-objek ditempatkan dalam golongan tertentu (Bahri, 2008).

Dari uraian di atas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit pengertian yang akan diteliti.

- a. Fungsi adalah kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga.
- b. Koordinasi adalah perwujudan dari kerjasama, saling membantu dan menghargai, menghayati tugas dan fungsi dan tanggung jawab masing-masing.
- c. Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggungjawabnya.
- d. Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.
- e. Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk di operasionalkan.
- f. Program pemerintah adalah upaya-upaya dalam mewujudkan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
- g. Kampung keluarga berencana (KB) adalah suatu kesatuan wilayah setingkat Desa/Kelurahan/Dusun/RW dengan kriteria tertentu dimanaterdapat Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

(KKBPK) yang terintegrasi dengan program lintas program lintas sektor lainnya.

- h. Sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah peralatan pembantu maupun peralatan utama yang berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

3.4 Kategorisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kategorisasi adalah penggolongan, proses dan hasil pengelompokan unsur bahasa dan bagian pengalaman manusia yang digambarkan kedalam kategori. Adapun kategori penelitian ini seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Kategorisasi Penelitian

No.	Konsep koordinasi	Kategorisasi
1.	Fungsi Koordinasi Vertikal	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya koordinasi yang dilakukan oleh pihak aparaturnya kecamatan dengan kelurahan dalam pelaksanaan program kampung KB - Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program kampung KB - Adanya tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan kampung KB - Adanya pelaksanaan program kampung keluarga sesuai prosedur
2.	Pelaksanaan Program Kampung KB	<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan dan pemerataan keluarga - Sarasehan tingkat RT - Sarasehan tingkat kampung - Operasional kampung KB - Pencatatan dan pelaporan.

Sumber : Hasil olahan: 2019

3.5 Narasumber

Adapun narasumber dalam penelitian ini sebanyak 4 orang yakni:

- a. Pegawai kecamatan : 2 orang
 - Kasubag umum (Toni Ismail S.Si)

- Ketua Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Program Kampung KB (Penti)
- b. Pegawai kelurahan : 2 orang
 - Lurah (Hadi Kusuma)
 - Ketua penyuluhan kampung KB (Meilani Febiola Harahap SST.,MKM)

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara yakni :

a. Data Primer

Data yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang telah ditentukan. Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap responden yang berkaitan dalam penelitian dengan cara wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan yang ada yang diteliti dan diperoleh dari buku atau penelitian kepustakaan, untuk mendukung penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses memilih dari beberapa sumber maupun permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Sedarmayanti:2011).

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tujuannya untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu peristiwa, keadaan, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik menggunakan angka-angka maupun kata-kata (Punaji, 2010).

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diuraikan secara deskriptif dan analisa secara kualitatif.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Kecamatan Binjai Kota, dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019.

3.9 Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

3.9.1 Letak dan Lokasi Penelitian

Binjai adalah salah satu kota yang berstatus kotamadya dalam wilayah provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Binjai terletak 22 km di sebelah barat ibukota provinsi Sumatera Utara, Medan. Sebelum berstatus kotamadya, Binjai adalah ibukota kabupaten Langkat yang kemudian dipindahkan ke Stabat. Binjai berbatasan langsung dengan kabupaten Langkat di sebelah barat dan utara serta kabupaten Deli Serdang di sebelah timur dan selatan. Letak geografis Binjai

03°03'40"-03°40'02" LU dan 98°27'03"-98°39'32", ketinggian rata-rata adalah 28 meter di atas permukaan laut.

Sebenarnya binjai hanya berjarak 8 km dari medan bila dihitung dari perbatasan di antara kedua wilayah yang dipisahkan oleh kabupaten deli serdang, jalan raya medan binjai yang panjangnya 22 km, 9 km pertama berada di jalan wilayah kota medan, km 10 sampai 12 berada dalam wilayah kota binjai.

Kota binjai terbagi atas 5 kecamatan yang kemudian dibagi lagi menjadi 37 kelurahan dan desa. Sedianya binjai hanyalah sebuah kecamatan di dalam lingkup kabupaten langkat. Lima kecamatan tersebut masing-masing yaitu; (1) Binjai Kota, (2) Binjai Utara, (3) Binjai Selatan, (4) Binjai Barat, (5) Binjai Timur.

Binjai kota adalah sebuah kecamatan di kota binjai, sumatera utara. Kecamatan binjai kota juga merupakan pusat pemerintahan kota binjai. Kecamatan binjai kota memiliki 4.12 km², jumlah penduduk 37. 700 dan kepadatan 9. 150 km² serta mempunyai 7 kelurahan . binjai kota juga merupakan pusat perekonomian dan bisnis di kota binjai.

3.9.2. Sejarah Singkat Kecamatan Binjai Kota

Dasar hukum pendirian kecamatan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Kecamatan binjai kota adalah adalah sebuah kecamatan di kota binjai, sumatera utara. Kecamatan binjai kota juga merupakan pusat pemerintahan kota binjai. Binjai kota juga merupakan pusat perekonomian dan bisnis di kota binjai.

Pasar tradisional terbesar, pasar travip terletak di jalan husni thamrin menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli dari kota binjai sekitarnya.

Kecamatan binjai kota terbagi atas 7 kelurahan:

- Kelurahan Berngam
- Kelurahan Binjai
- Kelurahan Kartini
- Kelurahan Pekan Binjai
- Kelurahan Satria
- Kelurahan Setia
- Kelurahan tangsi

3.9.3 Visi Misi Kecamatan Binjai Kota

Adapun Visi dari Kantor Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai yaitu :“Mewujudkan Kecamatan Binjai Kota sebagai kecamatan idaman yang dinamis dalam kebersamaan”. Sedangkan Misi dari Kantor Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai, yaitu :

- a. Memanfaatkan dan meningkatkan sumber daya aparatur secara optimal
- b. Peningkatan pelayanan masyarakat.
- c. Memanfaatkan potensi kecamatan secara maksimal.
- d. Pembersihan drainase di seluruh kelurahan.

3.9.4 Tugas Pokok Dan Fungsi

Dalam menjalankan aktivitasnya kecamatan binjai kota mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menjalankan pemerintahan dan meningkatkan pelayanannya.

a. Camat

1. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
2. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Camat mempunyai tugas:
4. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum
5. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
6. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
7. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota
8. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayan umum
9. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
10. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan

11. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan
12. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundangan – undangan
14. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat mempunyai fungsi
15. merumuskan program kerja kecamatan berdasarkan, RENSTRA dan RENJA dan rencana strategik
16. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
17. mengadakan rapat koordinasi tingkat kecamatan secara berkala
18. mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi terkait untuk terciptanya sinkronisasi kerja
19. menginventarisasi dan mengevaluasi permasalahan pemerintahan umum di kecamatan dan mengupayakan alternatif pemecahannya
20. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku
21. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karir

22. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Sekretaris camat

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
2. Sekretaris Camat mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang kesekretariatan dan melakukan pembinaan administratif kepada seluruh perangkat kecamatan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Camat mempunyai fungsi:
4. Menyusun program kerja sekretariat berdasarkan rencana kerja yang ada.
5. Mengkoordinir penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat kerja daerah (Renstra-SKPD).
6. Mengkoordinir penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK).
7. Mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU).
8. Mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja.
9. Mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).
10. Merencanakan dan menyelenggarakan urusan administratif keuangan, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga dan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kecamatan.

12. Mengkoordinasikan penyusunan program penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan melakukan pengendalian pelaksanaannya.
13. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pdoman dan ketentuan yang berlaku.
14. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas sekretaris camat.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat.
2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaian
 - b. Menyusun laporan kinerja (LKj) dan perjanjian kinerja
 - c. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - d. Menyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja
 - e. Memberikan pelayanan administratif surat menyurat dan pemeliharaan arsip dan dokumen surat

- f. Melakukan pemantauan arsip surat aktif dan inaktif
- g. Melakukan penataan, perawatan dan pengamanan kantor
- h. Menyusun konsep petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan pegawai
- i. Mengelola administrasi kepegawaian
 - 1. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan
 - 2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugas subbag umum;

d. Sub Bagian Keuangan dan Inventaris

- 1. Subbagian Keuangan dan Inventaris dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat.
- 2. Subbagian Keuangan dan inventaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris camat di bidang keuangan dan inventaris.
- 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Keuangan dan Inventaris mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana kegiatan urusan keuangan
 - b. Menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)
 - c. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - d. Melaksanakan urusan keuangan, pembukuan keuangan, laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan daerah

- e. Mengevaluasi hasil laporan keuangan
- f. Memonitoring dan mengawasi pelaksanaan inventaris aset dan barang kecamatan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugas subbag keuangan dan inventaris

e. Seksi Pemerintahan

1. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
2. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pemerintahan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun program kerja seksi pemerintahan berdasarkan rencana kerja yang ada
 - b. melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - c. memberikan pelayanan umum dan perijinan
 - d. memberikan pelayanan informasi dan administrasi perijinan sesuai standar pelayanan kepada masyarakat

- e. menghimpun, mengelola data dan informasi yang berhubungan dengan pemerintah dan kependudukan
 - f. menyiapkan bahan-bahan rapat koordinasi ditingkat Kecamatan;
 - g. menyusun program pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa
 - h. melaksanakan pembinaan keagrariaan
 - i. memantau pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - j. membantu penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan antara lain bidang pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban terhadap atasan;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas Kasi Pemerintahan;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan sosial.

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. menyusun program kerja seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan sosial berdasarkan rencana kerja yang ada
 - b. mengumpulkan dan mengolah data potensi Kelurahan, perencanaan program pembangunan Kelurahan dan perencanaan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat Kelurahan
 - c. merencanakan dan menyusun program pembinaan pembangunan sarana/prasarana fisik/non fisik dan perekonomian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam upaya pemberdayaan potensi yang ada
 - d. menyiapkan bahan - bahan pembinaan kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, pembangunan ekonomi produktif dan kehidupan keagamaan di Kecamatan
 - e. menyiapkan bahan-bahan pembinaan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi produktif, kegiatan peranan wanita serta kehidupan keagamaan
 - f. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pengendalian dan evaluasi peranan wanita serta kehidupan keagamaan
 - g. mengumpulkan, mengolah, menganalisa potensi kelurahan termasuk swadaya masyarakat dibidang pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan

- i. melaksanakan pembinaan dan pengembangan, menggali potensi dan bakat di bidang kepemudaan dan olahraga di kecamatan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban terhadap atasan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Ketentraman dan Ketertiban.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
 - a. menyusun program kerja seksi Ketenteraman dan Ketertiban Pelayanan Umum berdasarkan rencana kerja yang ada
 - b. mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data dibidang sosial, politik, ketentraman dan ideology Negara serta kebersihan dan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - c. menyiapkan bahan-bahan pembinaan, pengendalian dan bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan politik dalam negeri, ideology Negara, kesatuan bangsa, kewarganegaraan, ketertiban, ketenteraman,

kebersihan dan lingkungan hidup, serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan Pertahanan Sipil

- d. melaksanakan pengamanan dan penertiban terhadap peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum serta mengkoordinasikannya kepada instansi terkait
- e. mengumpulkan dan mengolah data daerah rawan bencana dan memformulasikan langkah antisipasinya dan rehabilitasinya
- f. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka membangun sistem informasi bencana melalui kerjasama aparaturnya pemerintahan dan posko siaga agar terwujud informasi bencana yang akurat
- g. memantau pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan bangunan (PBB)
- h. melakukan dan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait tentang penerimaan PBB dan bagi hasil pajak lainnya
- i. membantu dan menyiapkan laporan realisasi dan menghitung besaran tunggakan bagi hasil pajak pada wilayah kecamatan tiap tahun
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas Kasi Ketenteraman dan Ketertiban

h. Seksi Pelayanan Umum

1. Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
2. Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pelayanan Umum.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:
 - a. menyusun program kerja seksi Pelayanan Umum berdasarkan rencana kerja yang ada
 - b. mengumpulkan dan mengolah data perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan umum di tingkat kecamatan
 - c. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang bersifat administrasi
 - d. memberikan rekomendasi dan surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat
 - e. memberikan informasi dan persyaratan perizinan yang menjadi kewenangan camat
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan

- h. melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta atau instansi vertikal lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan pelayanan umum
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas Kasi Pelayanan Umum

i. Kelompok Jabatan Fungsional

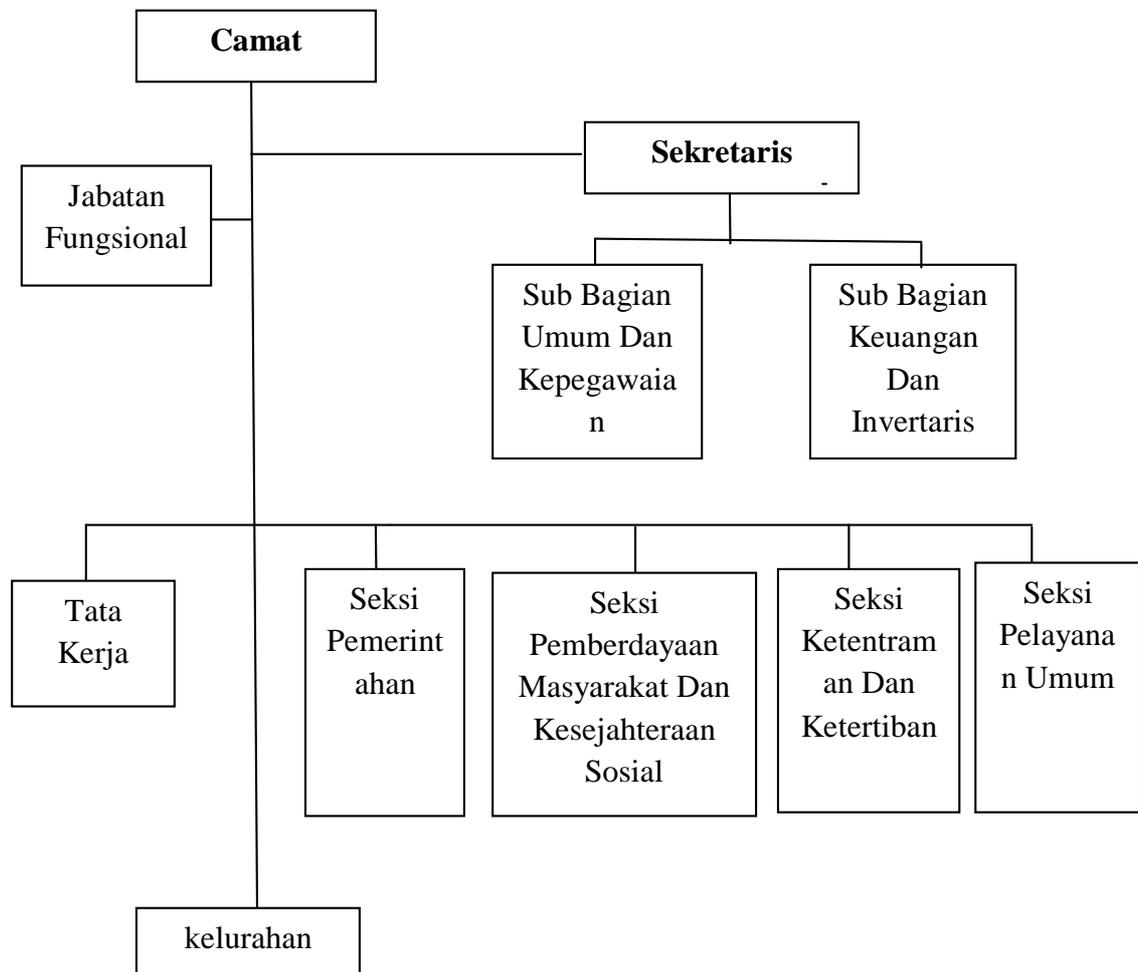
1. Pada Kantor Camat Binjai Kota dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
2. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
3. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
5. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
6. Jenis dan jenjang jabatan-jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

j. Tata Kerja

1. Dalam melaksanakan tugas setiap pemimpin unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
2. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan prundang-undangan yang berlaku.
3. Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.
4. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
5. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan hasil lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
6. Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

7. Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab masing-masing dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, diharapkan mengadakan rapat-rapat berkala.
8. Dalam memperlancar pelaksanaan tugas masing-masing pimpinan organisasi dan/ atau pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pembinaan. Pengawasan melekat, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan/ atau staf di lingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan kualitas sumber daya pegawai pada bawahannya.
10. Masing-masing pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan dan/ atau atasan langsungnya sesuai dengan hirarki jenjang jabatan.

Gambar 3.2
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Binjai Kota



Sumber : Kecamatan Binjai Kota

Tabel 3.2
Keadaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselonisasi Pada
Kecamatan Binjai Kota

Golongan	Jumlah	Persentase
IV/b	1	3,4%
III/a	3	10,3%
III/c	3	10,3%
III/d	3	10,3%
Honorer	19	65,5%
Jumlah	29	100%

Sumber: kecamatan binjai kota tahun 2019

Adapun keadaan pegawai negeri sipil berdasarkan kegenderan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Keadaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kegenderan Pada
Kecamatan Binjai Kota

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	14	49%
Perempuan	15	51%
Jumlah	29	100%

Sumber: kecamatan binjai kota tahun 2019

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Adanya Koordinasi Vertikal Oleh Pihak Kecamatan dengan Pihak

Kelurahan dalam Pelaksanaan Program Kampung KB

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Bapak Toni ismail S.Si selaku Kasubag Umum Kecamatan Binjai Kota, menyatakan bahwa pada dasarnya program kampung KB ini adalah program yang diberikan oleh pmkb kepada kelurahan setia sebagai pelaksana program melalui surat pengantar yang diberikan kepada kecamatan, dan kecamatan adalah sebagai pendamping sekaligus pembina program kampung KB. Dalam pelaksanaan kampung KB ini tidak ada hambatan baik dengan pihak kelurahan sebagai pelaksana program kampung KB maupun dengan pihak skpd yang terkait.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 12 Februari 2019 dengan Ibu Penti selaku ketua upt KB kecamatan binjai kota, beliau mengatakan bahwa pihak kecamatan sebagai pendamping dan pengawas program bertugas untuk menyampaikan usulan dari pihak pelaksana kampung KB kepada dinas-dinas yang terkait. Adapun dalam pelaksanaan kampung KB ini tidak ada kendala yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa Tanggal 12 Februari dengan Ibu Meilani Febiola Harahap SST, MKM selaku ketua penyuluh KB kelurahan setia menyatakan bahwa, Semua usulan pelaksanaan kegiatan kampung KB ini

berasal dari pokja (kelompok kerja) yang terdiri dari tokoh masyarakat baik itu tokoh formal maupun tokoh informal selanjutnya usulan dari masing-masing pokja tersebut akan disampaikan kepada pihak kecamatan, dan pihak kecamatan lah yang mengusulkan kembali program atau kegiatan yang akan di laksanakan oleh pelaksana kampung KB. Begitu pula koordinasi yang dilakukan pihak kecamatan dengan pihak kelurahan, tidak banyak kendala hanya saja dalam perealisasi kegiatan yang diusulkan membutuhkan waktu yang lama, hal inilah yang menyebabkan kegiatan akan membutuhkan waktu yang lama untuk di jalankan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Bapak Hadi Kusuma selaku Lurah Kelurahan Setia, beliau mengatakan bahwa, setiap usulan kegiatan yang akan dilaksanakan yang berkaitan dengan kampung KB, kegiatan itu diusulkan kepada pihak kecamatan dan pihak kecamatan lah yang akan mengusulkan kegiatan itu kepada dinas terkait. Kendala koordinasi ini adalah perealisasi kegiatan dari pihak atasan membutuhkan waktu yang sedikit lama.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program kampung KB tersebut koordinasi yang dilakukan antara pihak kecamatan dengan pihak kelurahan berjalan dengan baik. Ini dinyatakan oleh semua narasumber bahwa tidak ada hambatan-hambatan atau kendala dalam koordinasi program kampung KB tersebut.

4.1.2 Adanya Sarana Dan Prasarana Dalam Pelaksanaan Program Kampung KB.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Bapak Toni Ismail S.Si selaku Kasubbag Umum Kecamatan Binjai Kota, menyatakan bahwa pada dasarnya pihak kecamatan hanya sebagai penerima sarana dan prasarana yang diberikan oleh pihak dinas kepada pelaksana kampung KB melalui pihak kecamatan. Karena semua usulan dari kelurahan kegiatan yang harus pihak kecamatan. Penyedia sarana dan prasarana program kampung KB tersebut adalah dinas, misalnya pihak pelaksana kampung KB mengusulkan sebuah permohonan untuk menanam sayur-sayuran maka dinas yang berkewajiban menyediakan sarana dan prasaranya adalah dinas pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 12 Februari 2019 dengan Ibu Penti selaku ketua Upt KB Kecamatan Binjai Kota, beliau mengatakan bahwa, Dalam pemberian sarana dan prasarana pihak kecamatan tidak berperan banyak, pihak kecamatan hanya memberikan pelatihan dan penyuluhan dalam program kampung KB tersebut. Adapun pihak kecamatan sebagai pendamping maka pihak kecamatan hanya sebagai penerima sarana dan prasarana yang diberikan oleh pihak dinas kepada pihak pelaksana kampung KB.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 12 Februari dengan ibu Meilani Febiola Harahap SST.,MKM selaku ketua Penyuluh KB Di Kelurahan Setia, beliau mengatakan bahwa, reragam sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan program kampung KB, mulai dari narasumber atau

pelatih, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, pertanian, pembangunan jalan dan sebagainya. Karena kampung KB sifatnya tidak statis maka setiap bulan dibutuhkan sarana yang berbeda-beda, misalnya bulan pertama fokusnya pada bidang pendidikan maka yang dibutuhkan adalah sarana untuk menunjang pendidikan, dan begitu juga pada bulan-bulan selanjutnya. Semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan tergantung pada permasalahan apa yang dihadapi oleh kampung KB. Adapun sarana dan prasarana yang diberikan belum dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin oleh pelaksana kegiatan. Maka dilakukan upaya pendampingan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dari pihak kecamatan dan pihak dinas agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sarana dapat digunakan dengan baik pula.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Bapak Hadi Kusuma selaku Lurah Kelurahan Setia, beliau mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti perbaikan renase, perbaikan jalan, sarana prasarana lainya yang dibutuhkan. Misalnya benih-benih tanaman, alat kesehatan ibu dan balita, dan lain-lain. Seksi kampung KB yang telah dibentuk bertanggung jawab dalam mengarahkan kepada pihak masyarakat agar sarana dan prasarana yang telah diberikan dimanfaatkan dengan baik.

Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program kampung KB tersebut pihak kecamatan hanya memberikan sarana seperti pelatih atau penyuluh, melainkan sarana dan prasarana suatu kegiatan pada program itu diberikan oleh pihak dinas yang terkait.

4.1.3 Adanya Tujuan Dan Sasaran Dalam Pelaksanaan Program Kampung KB

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Bapak Toni Ismail S.Si selaku Kasubbag Umum Kecamatan Binjai Kota, beliau mengatakan bahwa Pihak kecamatan pendamping memberikan arahan-arahan yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan program kampung KB, mulai dari bagaimana pencapaian sasarannya, tujuannya, apa saja yang menjadi kendalanya dan memberi masukan yang lebih baik agar program tersebut dapat berjalan dengan baik dalam mencapai tujuannya.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 12 Februari 2019 dengan Ibu Penti selaku ketua upt Kampung KB di Kelurahan Setia, beliau mengatakan bahwa, upaya yang dilakukan adalah dengan cara melakukan pelatihan dan penyuluhan dengan baik kepada pihak kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 12 Februari dengan Ibu Meilani Febiola Harahap SST.,MKM selaku ketua Penyuluh KB di Kelurahan Setia beliau mengatakan bahwa, upaya dalam mencapai tujuan program kampung KB tersebut adalah koordinasi dan advokasi. Artinya semua pihak yang terkait yang dapat memberikan masukan dalam membantu tim pelaksana merealisasikan pencapaian tujuan. Oleh karena itu untuk mencapai sebuah tujuan yang maksimal, pelaksanaan kampung KB harus mendapat dukungan dan bantuan dari semua dinas sekota binjai. Adapun dalam pelaksanaan program kampung KB ini, banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan guna

mencapai tujuan dan sasaran dari kampung KB, akan tetapi pelaksanaan kampung KB ini belum mencapai maksimal oleh karena itu tujuan dari program kampung KB ini juga belum tercapai secara maksimal, akan tetapi pelaksana terus berusaha agar tujuan kampung KB ini dapat tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Bapak Hadi Kusuma selaku Lurah Kelurahan Setia, beliau mengatakan bahwa mengusulkan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan masyarakat kepada pihak kecamatan dan dinas yang terkait. Dan melaksanakan kegiatan dengan baik sesuai prosedurnya dan dengan pelatihan dari pihak penyuluh kampung KB. Dengan terlaksananya program kampung KB ini tentu membawa perubahan untuk masyarakat dan kelurahan setia ini, akan tetapi pencapaian tujuan dari program ini belum mencapai maksimal karena masih banyak kegiatan-kegiatan yang masih dalam tahap pelaksanaan.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program kampung KB ini sangat berpengaruh kepada pembinaan dan pengarahan dari pihak-pihak yang terkait dalam mencapai tujuan dan sasaran yang tepat. Adapun tujuan dari program kampung KB tersebut belum tercapai dengan baik.

4.1.4 Adanya Pelaksanaan Program Kampung KB Sesuai Prosedur

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Bapak Toni Ismail S.Si selaku Kasubbag Umum Kecamatan Binjai Kota, beliau mengatakan bahwa upaya mensukseskan kampung KB tersebut pihak kecamatan memberikan sarana berupa pelatih/penyuluh dalam setiap diadakannya

pertemuan oleh pihak pelaksana kampung KB, dan tinjauan langsung untuk meminimalisir kegagalan program. Berdasarkan pengawasan dan pengarahan dari pihak kecamatan pelaksanaan Kampung KB Di Kelurahan Setia sudah berjalan sesuai dengan prosedur. Program kampung KB melibatkan banyak pihak, yaitu: dinas-dinas yang terkait dalam memberikan dukungan dan bantuan-bantuan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pelaksanaan program kampung KB. Kecamatan sebagai pihak pengawas dan pembina program, BKKBN sebagai penyuluh, kelurahan sebagai pelaksana serta masyarakat kelurahan setia sebagai SDM.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 12 Februari 2019 dengan Ibu Penti selaku ketua Upt kampung KB di Kelurahan Setia, beliau mengatakan bahwa pihak kecamatan memberikan arahan-arahan seperti tinjauan langsung ke lapangan untuk meminimalisir kegagalan kegiatan dan memberikan solusi-solusi bila terdapat masalah dalam pelaksanaan kegiatan program tersebut. Adapun pihak yang terlibat, seperti, skpd-skpd yang terkait, pihak kecamatan, pihak BKKBN, pihak kelurahan dan masyarakat Kelurahan Setia.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Ibu Meilani Febiola Harahap selaku ketua penyuluh Kampung KB di Kelurahan Setia, beliau mengatakan bahwa berdasarkan gambaran secara umum pelaksanaan kampung KB ini sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur pelaksanaan kampung KB. Tetapi dalam pelaksanaan kegiatan kampung KB ini tidak semua kegiatan berjalan dengan baik, ada beberapa kegiatan yang kurang berjalan karena kurangnya partisipasi dari masyarakat. Seperti kegiatan pengajian

yang diadakan oleh pokja kampung KB, kegiatan ini kurang berjalan karena kurangnya keikutsertaan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Bapak Hadi Kusuma selaku Lurah Kelurahan Setia, beliau mengatakan bahwa pelaksanaan kampung KB ini sudah berjalan sesuai prosedur pelaksanaan kampung KB. Tetapi belum 100% program berjalan dengan baik karena masih kurangnya partisipasi dari pihak masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kampung KB di Kecamatan Binjai Kota Kelurahan Setia sudah berjalan sesuai prosedur pelaksanaan kampung KB, namun kegiatan dari program kampung KB tersebut masih ada yang kurang berjalan dengan baik karena kurangnya partisipasi dari masyarakat.

4.1.5 Pendataan dan Pemerataan Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Bapak Toni Ismail S.Si selaku Kasubbag Umum Kecamatan Binjai Kota, beliau mengatakan bahwa pendataan terkait kegiatan-kegiatan dan kependudukan Kelurahan Setia dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan hanya menerima laporan dari pendataan yang dilakukan oleh pihak kelurahan. Pihak kecamatan tidak banyak berperan dalam pelaksanaan di lapangan, pihak kelurahanlah yang bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan di lapangan dengan pengawasan dan pendampingan dari pihak kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 12 Februari 2019 dengan Ibu Penti selaku ketua Upt kampung KB di kelurahan setia beliau mengatakan bahwa,

pihak kecamatan tidak melakukan pendataan terkait dengan pelaksanaan kampung KB, melainkan pihak kecamatan hanya sebagai penerima laporan pelaksanaan kegiatan dari pihak kelurahan. Dengan adanya sarana dan prasarana yang diberikan oleh skpd-skpd, pihak kecamatan hanya memberikan pengarahan agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Ibu Meilani Febiola Harahap selaku ketua penyuluh Kampung KB Kelurahan Setia, beliau mengatakan bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksana Kampung KB tersebut di data. Mulai dari pemetaan usaha perekonomian, pemetaan kelompok ketahanan masyarakat seperti: posyandu, BKB, BKR, PIKR, PPKS (usaha pemetaan ekonomi produktif/usaha makanan), pemetaan dari wilayah berdasarkan kesehatan, serta pendataan penduduk, kesertaan KB, dan kesertaan BKB. Dan pemerataan keluarga dibidang perekonomian masih dalam kategori prasejahtera, karena pendapatan ekonomi keluarga masih banyak yang dibawah angka rata-rata yang disebabkan masih banyaknya pengangguran yang tercatat di wilayah kelurahan setia. Adapun semua kegiatan kampung KB dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Kelurahan Setia.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Bapak Hadi Kusuma selaku Lurah Kelurahan Setia, beliau mengatakan bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan dalam kampung KB harus dilaporkan kepada pihak kecamatan mulai dari keadaan penduduk, perekonomian dan hail lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program kampung KB. Pemerataan

keluarga berdasarkan dari pembangunan ekonominya sampai saat ini belum merata, disebabkan oleh masih banyak nya pengangguran dan hal-hal lainnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan terkait Kampung KB tersebut harus dilaporkan kepada pihak kecamatan sebagai bukti otentik bahwa Kampung KB tersebut berjalan dan dilaksanakan dengan baik. Serta pemerataan ekonomi di kelurahan setia tersebut belum merata disebabkan oleh salah satunya pengangguran yang masih tercatat tinggi.

4.1.6 Pertemuan Tingkat RT

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Bapak Toni Ismail S.Si selaku Kasubbag Umum Kecamatan Binjai Kota, beliau mengatakan bahwa pihak kecamatan ikut berperan dalam pelaksanaan pertemuan yang diadakan di kelurahan tersebut, dan kegiatan itu diadakan dalam tiga bulan sekali pertemuan dengan pembahasan terkait apa yang akan dilaksanakan oleh panitia kecil atau pokja (kelompok kerja). Para RT merumuskan usulan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh pokja.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 12 Februari 2019 dengan Ibu Penti selaku ketua Upt Kampung KB di Kelurahan Setia, beliau mengatakan bahwa pihak kecamatan berperan dalam pertemuan tersebut. Adapun pertemuan tersebut bertujuan untuk membicarakan usulan-usulan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh pokja Kampung KB.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Ibu Meilani Febiola Harahap SST.,MKM selaku ketua penyuluh Kampung KB Kelurahan Setia, beliau mengatakan bahwa pertemuan ini membicarakan mengenai permasalahan yang ada di wilayah mereka masing-masing. Misalnya wilayah 1 permasalahannya mengenai kesehatan dan di wilayah 2 mengenai ekonomi, maka dalam pertemuan ini permasalahan itulah yang akan menjadi pembahasannya. Dan begitu pula dengan para RT/RW saling bekerjasama dalam kepengurusan kampung KB artinya seluruh kepling dari RT/RW masing-masing wilayah masuk dalam kepengurusan kampung KB atau pokja (kelompok kerja). Pokja kampung KB mempunyai pertemuan sendiri khusus untuk membahas pelaksanaan kegiatan program kampung KB.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Bapak Hadi Kusuma selaku Lurah Kelurahan Setia, beliau mengatakan bahwa pertemuan kampung KB dilaksanakan oleh kepling sebagai pengurus kampung KB dan dinas-dinas yang terkait. Pertemuan RT membahas mengenai perumusan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilaksanakan dalam kampung KB tersebut. Adapun kegiatan yang diadakan dalam program kampung KB tersebut dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Kelurahan Setia.

Dapat disimpulkan bahwa pihak kecamatan sebagai pelatih ikut berperan dalam pertemuan tingkat RT bertujuan untuk merumuskan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan dalam kampung KB tersebut berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi oleh kampung KB. Adapun dalam pelaksanaan kegiatan di

kampung KB semua RT/RW dan seluruh warga Kelurahan Setia bekerjasama dan berpartisipasi dalam kegiatan yang akan diadakan.

4.1.7 Pertemuan Sarasehan Tingkat Kampung

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Bapak Toni Ismail S.Si selaku kasubbag umum Kecamatan Binjai Kota, beliau mengatakan bahwa Pertemuan sarasehan ini dilakukan untuk menginformasikan kepada seluruh warga guna menyampaikan pentingnya kampung KB. Pertemuan sarasehan dilaksanakan dengan baik oleh pihak pelaksana dengan dibantu oleh koordinasi dari pihak kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 12 Februari 2019 dengan Ibu penti selaku ketua Upt kampung KB di Kelurahan Setia, beliau mengatakan bahwa pihak kecamatan juga ikut berperan dalam pertemuan sarasehan tersebut dan pihak kecamatan juga ikut memberikan penyuluhan terkait kampung KB. Pertemuan tersebut membahas tentang penyuluhan kampung KB yang ada di wilayah kelurahan setia, dan pentingnya kampung KB.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa pada tanggal 12 Februari 2019 dengan Ibu Meillani Febiola Harahap SST.,MKM selaku ketua penyuluhan Kampung KB Kelurahan Setia, beliau mengatakan bahwa semua unsur pelaksana kampung KB ikut dalam pertemuan sarasehan. Mulai dari lurah, pkb, kepling, pengurus diluar selain kepling dalam pokja kampung KB, kader-kader kesehatan, seperti: posyandu,kader KB,remaja, termasuk semua unsur dalam masyarakat ikut dalam pertemuan sarasehan. Adapun pertemuan sarasehan ini bertujuan untuk

merumuskan rencana selanjutnya dalam program kampung KB. Misalnya di pertemuan pertama terdapat masalah yang akan diatasi maka dipertemuan berikutnya masalah tersebut dievaluasi. Jika suatu masalah sudah selesai maka akan dirumuskan permasalahan yang lainnya, dan begitu seterusnya.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Bapak Hadi Kusuma selaku Lurah Kelurahan Setia, beliau mengatakan bahwa dinas yang terkait dan warga masyarakat kelurahan setia adapun dinas yang di undang setiap bulan berbeda beda. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan yang akan dilakukan dan penyuluhan kampung KB oleh pihak terkait.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pertemuan sarasehan ini dihadiri oleh semua pihak yang terkait, pertemuan ini membahas tentang hasil dari pelaksanaan kegiatan kampung KB dan membahas tentang rencana kegiatan selanjutnya.

4.1.8 Operasional Kampung Keluarga Berencana (KB)

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Bapak Toni Ismail S.Si selaku Kasubbag Umum Kecamatan Binjai Kota, beliau mengatakan bahwa pihak kecamatan sebagai pengawas dan pembina maka upaya nya adalah melalui pengawasan yang baik serta pembinaan yang baik. Dengan adanya program kampung KB ini dapat membantu para ibu-ibu mendapatkan penghasilan juga dengan cara menanam sayur-sayuran dengan lahan dan bahan yang telah disediakan oleh kampung KB, dan kemudian sayuran-

sayuran ini dipasarkan oleh pelaksana kampung KB tersebut, dan hasilnya diserahkan kepada ibu-ibu kampung KB tersebut, serta diadakanya kegiatan merajut bagi ibu-ibu dan remaja kampung KB dan kemudian pihak skpdlah yang memasarkanya.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 12 Februari 2019 dengan Ibu Pentil selaku Ketua Upt Kampung KB Di Kelurahan Setia, beliau mengatakan bahwa melalui pengawasan dan pembinaan, serta pelatiha yang baik. Kampung KB sebagai wahana dimana masyarakat diberdayakan dan difasilitasi oleh skpd-skpd sekota binjai, semua kegiatan masyarakat di kampung KB tersebut didukung oleh dinas yang terkait, seperti merajut dan lain-lain. Merajut ini akan menghasilkan pendapatan bagi ibu-ibu karena hasil dari rajutan ibu-ibu tersebut akan di pasarkan oleh pihak skpd yang terkait.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Ibu Meilani Febiola Harahap SST.MKM selaku Ketua Penyuluh Kampung KB Kelurahan Setia, beliau mengatakan bahwa kampung KB adalah program pemerintah dan kelurahan setia adalah salah satu kelurahan di kecamatan binjai kota yang ditetapkan sebagai pelaksanaan kampung KB berdasarkan kriteria wilayah yang tertinggal di tengah kota, oleh karena itu kampung KB di dukung oleh semua skpd yang ada di kota binjai dan dpendanaanya berasal dari semua skpd tersebut. Program kampung KB ini diharapkan dapat meningkatkan tarap hidup, dan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Setia. Pelaksanaan belum mencapai 80% dari apa yang diharapkan, akan tetapi pihak pelaksana

sudah berupaya sebaik mungkin agar program kampung KB tersebut berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Bapak Hadi Kusuma selaku Lurah Kelurahan Setia, beliau mengatakan bahwa, di dalam kampung KB di bentuk pokja (kelompok kerja) yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kampung KB, pokja tersebut terdiri dari masyarakat Kelurahan Setia. Kegiatan yang diusulkan oleh pokja diusulkan kepada pihak kecamatan dan pihak kecamatanlah yang mengusulkan/meneruskan kepada dinas yang dituju. Misalnya yang di usulkan adalah benih-benih tanaman, maka pihak yang bertanggung jawab adalah dinas pertanian. Pelaksanaanya kampung Kb di kelurahan setia belum terlaksana dengan baik karena kurangnya partisipasi dari masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa dengan pengawasan dan pembinaan yang baik program ini dapat berjalan dengan baik pula narasumber mengatakan bahwa program kampung KB ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya ibu-ibu. Dengan adanya program kampung KB ini diadakan kegiatan-kegiatan kegiatan guna meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Adapun pelaksanaan kampung KB ini belum begitu baik, salah satunya karena karena kurangnya partisipasi masyarakat.

4.1.9 Pencatatan dan Pelaporan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 12 Februari 2019 dengan Bapak Toni Ismail S.Si Selaku Kasubbag Umum Kecamatan Binjai

Kota, beliau mengatakan bahwa semua kegiatan dari pelaksanaan kampung KB harus dilaporkan kepada pihak kecamatan sebagai laporan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan yang diterima berbentuk data, dan laporan mengenai seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pihak pelaksana di kelurahan setia, mulai dari jejaring sosial, komunitas kelompok, pokja (kelompok kerja) untuk mensinkronkan hasil apa yang harus dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 12 Februari 2019 dengan Ibu Penti selaku ketua Upt Kampung KB di Kelurahan Setia, beliau mengatakan bahwa, Semua kegiatan dalam pelaksanaan kampung KB tersebut harus dilaporkan kepada pihak kecamatan, mulai dari kegiatan dan perkembangan pelaksanaan kampung KB, dan bagaimana jalanya kampung KB tersebut sebagai bukti bahwa program tersebut berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Ibu Meilani Febiola Harahap SST.MKM. selaku kepala penyuluhan kampung KB di kelurahan setia, beliau mengatakan bahwa pelaksanaan kampung KB di kelurahan setia ini dimulai sejak tanggal 25 September 2017, dengan ditetapkannya kelurahan setia sebagai kampung KB, tim pelaksana pun melakukan penyuluhan tentang pembangunan kampung, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan KB. Dengan demikian warga mulai mengikuti program KB dengan berbagai alat kontrasepsi, hal ini dibuktikan dengan banyaknya warga yang mengikuti berbagai program tersebut, mulai dari penggunaan spiral 54 orang (wanita), mow(medis operasi wanita) 35 orang, mop(medis operasi pria) 7 orang, kondom 13 orang implant 99 orang, suntik 120

orang, pil 96 orang, dari jumlah penduduk 4.510 orang, dengan jumlah laki-laki 2163 orang dan jumlah perempuan 2347 orang dengan 1052 kepala keluarga. . Alat-alat KB tersebut disediakan oleh kampung KB yang bekerjasama dinas kesehatan melalui posyandu dan puskesmas yang ada di kelurahan setia. Persentasenya hingga saat ini sudah mencapai 75%. Semua kegiatan kampung KB tersebut dilaporkan kepada pihakkecamatan. Seperti kegiatan pelatihan menjahit, pelatihan masak memasak, menganyam yang dinamai dengan kegiatan P3AM, KBK(bina keluarga balita) yang dilakukan sekali dalam setiap bulan, senam lansia yang diadakan setiap sebulan sekali serta penyuluhan dari dokter secara gratis dan melakukan cek gula darah, kegiatan PIK.R yaitu informasi konseling dari dinas pariwisata untuk remaja mengenai seni tari, drama, keadaan penduduk dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Bapak Hadi Kusuma selaku lurah kelurahan setia, beliau mengatakan bahwa kesertaan KB sudah mencapai 75%, dan semakin hari semakin bertambah jumlahnya. Serta semua kegiatan yang dilakukan harus dilaporkan kepada pihak kecamatan sebagai bukti bahwa pelaksanaan kampung KB berjalan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini kesertaan KB sudah mencapai 75% dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Adapun semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kampung KB tersebut dilaporkan kepada pihak kecamatan, sebagai bukti program itu dijalan oleh pihak pelaksana.

4.2 Pembahasan

Adapun pembahasan dalam penelitian ini sesuai dengan hasil yang telah di dapat peneliti di lokasi penelitian. Tujuan dilaksanakannya koordinasi vertikal adalah untuk meraih dan memelihara keefektivitasan organisasi seoptimal mungkin dengan sinkronasi, kebersamaan, keselarasan serta keseimbangan antara aktivitas yang saling berhubungan.

Koordinasi antara pihak kecamatan dan pihak kelurahan dalam pelaksanaan program kampung KB. Semua usulan pelaksanaan kegiatan kampung KB ini berasal dari pokja (kelompok kerja) yang terdiri dari tokoh masyarakat baik itu tokoh formal maupun tokoh informal, kemudian usulan dari masing-masing pokja akan disampaikan kepada pihak kecamatan, dan pihak kecamatan yang akan mengusulkan kepada pihak dinas yang terkait program atau kegiatan yang akan di laksanakan oleh pelaksana kampung KB. Begitu pula koordinasi yang dilakukan pihak kecamatan dengan pihak kelurahan, tidak banyak kendala hanya saja dalam perealisasiian kegiatan yang diusulkan membutuhkan waktu yang lama, hal inilah yang menyebabkan kegiatan akan membutuhkan waktu yang lama untuk di kerjakan.

Dengan adanya koordinasi vertikal antara pihak kecamatan binjai kota dengan pihak kelurahan setia, pelaksanaan program kampung KB yang dilaksanakan di kelurahan setia dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, walaupun belum maksimal. Dalam koordinasi ini tidak ada hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program kampung KB, dan pegawai melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini dapat

diperkuat dengan adanya teori (Inu, 20). Koordinasi vertikal adalah penyalarsan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga-lembaga lain yang derajatnya lebih rendah.

Sarana dan prasarana merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan yang berfungsi mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini diperkuat oleh teori dari (KBBI, 2002) Sarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha/pembangunan. Sedangkan, Prasarana segala sesuatu (bisa berupa syarat atau upaya) yang dapat dipakai sebagai alat media dalam mencapai tujuan.

Sarana dan prasarana berfungsi untuk mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu, meningkatkan produktivitas, baik barang dan jasa, hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin, lebih memudahkan atau sederhana dalam gerak para pengguna, ketetapan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin, menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan, menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang mempergunakannya. Adapun dalam pelaksanaan program kampung KB sarana dan prasarana adalah hal pokok yang paling penting untuk diperhatikan. Dengan berbagai kegiatan dari program kampung KB tentu sarana dan prasarana yang dibutuhkan juga beragam dan bersumber dari dinas-dinas yang berkaitan dengan kegiatan kampung KB. Adapun contoh sarana dan prasarana yang dibutuhkan mulai dari narasumber (penyulu), pelatih, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, pertanian, pembangunan jalan dan sebagainya. Karena kampung KB sifatnya tidak statis maka setiap bulan dibutuhkan sarana yang

berbeda-beda, misalnya bulan pertama fokusnya pada bidang pendidikan maka yang dibutuhkan adalah sarana untuk menunjang pendidikan, dan begitu juga pada bulan-bulan selanjutnya. Semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan tergantung pada permasalahan apa yang dihadapi oleh kampung KB. Sarana dan prasarana dalam menunjang keberhasilan program kampung KB di kelurahan setia adalah hal yang sangat diperhatikan oleh pihak dinas, dan pihak-pihak yang terkait agar tercapainya sebuah tujuan kampung KB. Akan tetapi pemanfaatan sarana prasarana yang diberikan itu belum efektif, disebabkan oleh kurangnya pembinaan dari pihak-pihak yang terkait.

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Handoko, 2003). Setiap pelaksanaan suatu program atau kegiatan pastilah mempunyai suatu tujuan. Begitu juga dalam pelaksanaan program kampung KB Seperti yang yang diungkapkan oleh Dwi Listyawandani. Program kampung KB ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Upaya pihak kecamatan dalam mencapai tujuan pelaksanaan program kampung KB dengan pelatihan dan penyuluhan dengan baik kepada pihak kelurahan. Upaya lainnya dalam mencapai tujuan program kampung KB adalah dengan adanya koordinasi dan advokasi. Yaitu semua pihak yang terkait yang dapat memberikan masukan yang bisa membantu

pelaksana merealisasikan pencapaian tujuan, akan tetapi pelaksanaan program kampung KB belum mencapai tujuan yang maksimal karena masih ada kegiatan-kegiatan yang masih dalam tahap proses pelaksanaan.

Berhasilnya sebuah program tentu saja tidak terlepas dari pelaksanaan yang baik dan terarah. Dalam sebuah program, pelaksanaan yang baik adalah suatu proses untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan, maka tentu saja sebuah pelaksanaan yang baik mempunyai prosedur yang sudah direncanakan. Pelaksanaan/penggerakan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas untuk bekerja dengan sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan (*actuating*) dilakukan setelah sebuah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian terhadap sumber daya yang ada (Siagian, 2007).

Berdasarkan gambaran secara umum pelaksanaan kampung KB ini sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur pelaksanaan kampung KB. Tetapi dalam pelaksanaan kegiatan kampung KB ini belum semua kegiatan berjalan dengan baik, ada beberapa kegiatan yang kurang berjalan karena kurangnya partisipasi dari masyarakat. Seperti kegiatan pengajian yang diadakan oleh pokja kampung KB, kegiatan ini kurang berjalan karena kurangnya keikutsertaan masyarakat.

Dalam kategorisasi ini kecamatan binjai kota kelurahan setia sudah memenuhi standar pelaksanaan suatu program atau kegiatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Siagian. Pelaksanaan program kampung KB di kecamatan binjai

kota kelurahan setia sudah berjalan dengan baik, namun kurangnya partisipasi masyarakat menyebabkan kegiatan program kampung KB ini masih ada yang belum berjalan dengan maksimal.

Pendataan dan Pemetaan Keluarga dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu:

Pendataan Keluarga (PK) yang dilaksanakan secara Nasional, kemudian dianalisa untuk kepentingan kegiatan di masing-masing seksi diantaranya : (1) Sasaran Pelayanan Kependudukan, (2) Sasaran Pelayanan Program KB, (3) Sasaran Pelayanan Program Ketahanan Keluarga, (4) Sasaran Pelayanan pemberdayaan Ekonomi Keluarga, (5) Sasaran Perbaikan Rumah Layak Huni, (6) Sasaran Peningkatan Kesehatan Lingkungan, (7) Sasaran Pencegahan Narkoba, (8) Dan lain-lain (Dwi Listyawandani, 2017).

Pada hakikatnya semua program atau kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat harus ada pendataan tentang kependudukan, perekonomian dan lain-lain. Dari teori di atas jelas dikatakan bahwa semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program kampung KB harus dilakukan pendataan sesuai dengan dengan keadaan masyarakat melalui tahapan-tahapan yang ada. Dalam pelaksanaan program kampung KB Di Kecamatan Binjai Kota Kelurahan Setia, sudah dilakukan pencatatan dengan baik oleh pihak kelurahan terkait pelaksanaan program kampung KB, tetapi dalam pelaksanaan pembangunan pemerataan keluarga sudah diterapkan tetapi belum terealisasikan dengan baik.

Pertemuan di tingkat RT minimal dilaksanakan setiap tiga bulan sekali atau sesuai kebutuhan masyarakat yang dipimpin oleh ketua RT, dilaksanakan setelah

analisa pendataan. Adapun hal-hal yang dibicarakan yaitu: membahas hasil pendataan kemudian dituangkan dalam peta keluarga tingkat RT, membahas masalah-masalah dan potensi yang ada ditingkat RT, menyusun program kerja yang akan dibawa/diusulkan di dalam rapat RW/kampung, melaksanakan lelang lelang kepedulian untuk membangun rumah prasejahtera/tidak layak huni (Dwi, Listyawandani, 2017).

Dalam pelaksanaan program kampung KB adanya pertemuan tingkat RT yang berfungsi untuk membicarakan dan merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pokja kampung KB, serta membicarakan masalah-masalah yang terdapat di setiap wilayah RW. Setiap RT/RW saling bekerjasama dalam kepengurusan kampung KB artinya seluruh kepling dari RT/RW masing-masing wilayah masuk dalam kepengurusan kampung KB atau pokja (kelompok kerja KB). Dalam pelaksanaan program kampung KB di kelurahan setiap pertemuan tingkat RT sudah diterapkan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedurnya.

Sarasehan di tingkat Kampung /RW merupakan puncak pembentukan komitmen di Kampung KB. Sarasehan sebaiknya dilaksanakan setahun dua kali. Pada awal tahun sebagai ajang perencanaan dan evaluasi serta pertengahan tahun sebagai alat pemantauan program di tahun yang sedang berjalan. Di luar itu bisa saja pertemuan dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kepentingan. Peserta pertemuan, yaitu: Pengurus Kampung KB/Pokja, Para Ketua RT, Pengurus Organisasi di tingkat RT (DKM, Organisasi Pemuda dsb), Para Ketua Paguyuhan tingkat RT, Tokoh-tokoh masyarakat, Seluruh warga satu kampung (secara

selektif sesuai dengan kebutuhan). Pembahasan: Evaluasi pelaksanaan Program tahun yang lalu, Perencanaan program tahunan yang diusulkan masing-masing RT, Pembahasan program masing-masing seksi (Dwi Listyawandani, 2017).

Pertemuan tingkat kampung sangat penting untuk diadakan untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, dari pelaksanaan Program Kampung KB di Kecamatan Binjai Kota Kelurahan Setia pertemuan sarasehan tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedurnya. Adapun pertemuan ini dilakukan dalam satu tahun dua kali. Dalam pertemuan ini semua unsur pelaksana kampung KB ikut berperan. Mulai dari lurah, pkb, kepling, pengurus diluar selain kepling dalam pokja kampung KB, kader-kader kesehatan, seperti: posyandu, kader KB, remaja, termasuk semua unsur dalam masyarakat ikut dalam pertemuan sarasehan. Adapun pertemuan sarasehan ini bertujuan untuk membicarakan hasil dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan serta merumuskan rencana selanjutnya.

Kegiatan rutin Kampung KB dilaksanakan secara terus menerus oleh pengurus Pokja Kampung KB termasuk seksi-seksi dan keluarga terhadap program KKBPk dan lintas sektor terkait melalui penerapan 8 fungsi keluarga. Diharapkan dengan adanya Kampung KB, keluarga semakin meningkat kesejahteraannya dan tidak terdapat lagi keluarga miskin di Kampung KB. Miskin tidak hanya kekurangan ekonomi tapi terhindar dari segala bentuk kemiskinan (Dwi Listyawandani, 2017).

Dalam indikator ini penulis menyimpulkan bahwa melalui pengawasan yang baik serta pembinaan yang baik program kampung KB dapat berjalan dengan

baik pula, dan dengan adanya program kampung KB ini dapat membantu perekonomian masyarakat, serta dengan adanya program kampung KB ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Setia. Adapun pelaksanaan program kampung KB yang dilaksanakan di Kelurahan Setia Kecamatan Binjai Kota berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur, walaupun masih ada hambatan-hambatan dan kegiatan kampung KB yang belum mencapai maksimal.

Pencatatan dan pelaporan di Kampung KB pada prinsipnya mengikuti dua pola, yaitu: (1) Pencatatan dan pelaporan yang telah baku sesuai dengan aturan program dari tingkat yang lebih atas dari masing-masing instansi pemerintahan/Lembaga, misalnya laporan program KKBPK, Laporan posyandu, laporan organisasi lainnya, (2) Pencatatan dan pelaporan khusus di Kampung KB (Dwi Listyawandani, 2017).

Semua kegiatan kampung KB tersebut harus mempunyai pendataan yang dilaporkan kepada pihak kecamatan, sebagai bentuk laporan bahwa kegiatan dari program kampung KB terlaksana. Contohnya seperti kegiatan pelatihan menjahit, pelatihan masak memasak, menganyam yang dinamai dengan kegiatan P3AM, KBK(bina keluarga balita) yang dilakukan sekali dalam setiap bulan, senam lansia yang diadakan setiap sebulan sekali serta penyuluhan dari dokter secara gratis dan melakukan cek gula darah, kegiatan PIK.R yaitu informasi konseling dari dinas pariwisata untuk remaja mengenai seni, drama keadaan penduduk dan lain-lain.

Dapat disimpulkan dalam pelaksanaan program kampung KB, pencatatan dari kegiatan-kegiatan atau hasil dari pelaksanaan kegiatan itu harus melalui tahapan-tahapan pencatatan program kampung KB. Adapun dalam Pelaksanaan program kampung KB di kelurahan setia pencatatan sebagai laporan untuk semua kegiatan dan unsur pencatatan lainnya dilakukan dengan baik sesuai tahapan-tahapannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan maka penulis menarik simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fungsi koordinasi vertikal yang dilakukan antara pihak kecamatan dengan pihak kelurahan dalam pelaksanaan program kampung KB sudah dilaksanakan sesuai standar dan ukuran koordinasi namun dalam pelaksanaannya belum maksimal.
2. Dalam pelaksanaan program kampung KB tersebut pihak kecamatan hanya memberikan sarana seperti pelatih atau penyuluh, melainkan sarana dan prasarana suatu kegiatan pada program itu diberikan oleh pihak dinas yang terkait.
3. Pelaksanaan program kampung KB ini sangat berpengaruh kepada pembinaan dan pengarahan dari pihak-pihak yang terkait dalam mencapai tujuan dan sasaran yang tepat.
4. Pelaksanaan kampung KB di Kecamatan Binjai Kota Kelurahan Setia sudah berjalan sesuai prosedur pelaksanaan kampung KB, namun kegiatan dari program kampung KB tersebut masih ada yang kurang berjalan dengan baik karena kurangnya partisipasi dari masyarakat.
5. Semua kegiatan yang dilaksanakan terkait Kampung KB tersebut harus dilaporkan kepada pihak kecamatan sebagai bukti otentik bahwa Kampung KB tersebut berjalan dan dilaksanakan dengan baik. Serta

pemerataan ekonomi di kelurahan setia tersebut belum merata disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya pengangguran yang masih tercatat tinggi.

6. Pihak kecamatan sebagai pelatih ikut berperan dalam pertemuan tingkat RT bertujuan untuk merumuskan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan dalam kampung KB berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi oleh kampung KB. Dan seluruh RT/RW dan seluruh warga Kelurahan Setia bekerjasama dan berpartisipasi dalam kegiatan yang akan diadakan.
7. Pertemuan sarasehan ini dihadiri oleh semua pihak yang terkait, pertemuan ini membahas tentang hasil dari pelaksanaan kegiatan kampung KB dan membahas tentang rencana kegiatan selanjutnya.
8. Dengan pengawasan dan pembinaan yang baik program ini dapat berjalan dengan baik pula. Dengan adanya program kampung KB ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya ibu-ibu. Adapun dalam pelaksanaan kampung KB ini belum berjalan dengan sangat baik, karena adanya beberapa faktor salah satunya karena kurangnya partisipasi masyarakat.
9. Hingga saat ini kesertaan KB sudah mencapai 75% dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Adapun semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kampung KB tersebut dilaporkan kepada pihak kecamatan.

5.2 Saran-Saran

Setelah menguraikan pembahasan dan menarik simpulan maka beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak Kecamatan Binjai Kota sebagai pendamping program kampung KB seharusnya dapat lebih mengarahkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilajankan di kelurahan setia agar berjalan dengan baik.
2. Seharusnya kelurahan setia sebagai wilayah pelaksana program kampung KB dapat memanfaatkan segala sarana maupun prasarana yang telah disediakan agar tercapainya pelaksanaan program kampung KB yang baik.
3. Demi tercapainya tujuan dan sasaran program Kampung Keluarga Berencana (KB) diharapkan agar pihak kelurahan dapat bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan baik.
4. Meningkatkan taraf hidup manusia yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat, mempunyai rasa tanggung jawab yang besar atas program Kampung KB.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bahri. 2008. *Konsep dan Definisi Konseptual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Binanto. 2009. *Konsep Bahasa Pemrograman*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Gie, The, Liang. 1992. *Administrasi Perkantoran Modern edisi keempat*. Yogyakarta: Liberty.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi aksara.
- . 2014, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Handoko.T.H. 2003. *Pengantar Manajemen Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE.
- Listyawandani, Dwi. 2017. *Pedoman Pengelolaan Kampung KB:BKKBN*.
- Munir, H Dasril dkk. 2004. *Kebijakan Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAP.
- Punaji. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Rachamd, Tb sentika. 2015. *Koordinasi Pengelolaan Program Jaminan Sosial*. Jakarta: Asdep jaminan sosial.
- Serdamayanti. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (cetakan kelima)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Siagian, P sondang. 2001. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- . 2007, *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Surapaty, Surya Chandra.2015. *Petunjuk Teknis Kampung Kb*. Jakarta: BKKBN.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- . 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabet.

Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Manajemen pemerinyahan*. Pustakan Reka Cipta. Jawa Barat

Tjokomidjojo, Bintaro. 2000. *Teori Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT. Gunung Agung.

Dokumen

Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

Undang-undang RI No 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Jurnal

Ding, Damianus. 2014. Studi Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). 2 (2): 2888-2902.

Shobry, Muhammad nuri. 2017. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Program Urban Farming Di Kabupaten Gresik. 5 (2): 2303-3410.

Web

Ardhiansyah, Arifin. 2010. Pelaksanaan. [Online]. Available. At: <http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html?m=1> [Diakses 26 Desember 2018].

KBBI. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Online. Available. At: <https://kbbi.web.id/fungsi.html> [Diakses 30 Desember 2018].

KBBI. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online]. Available. At: <https://kbbi.web.id/koordinasi.html> [Diakses 30 Desember 2018].

KBBI. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online]. Available. At: <https://kbbi.web.id/pelaksanaan.html> [Diakses 30 Desember 2018].

KBBI. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online]. Available. At: <https://kbbi.web.id/sarana.html> [Diakses 26 Februari 2019].

KBBI. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online]. Available. At: <https://kbbi.web.id/prasarana.html> [Diakses 26 Februari 2019].